

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wacana demokrasi dan Islam sering diwarnai pro dan kontra, wacana tersebut selalu menarik untuk diperbincangkan meskipun umat Islam sebenarnya tidak pernah sepakat dengan maknanya. Hal ini tampak dari panggung politik kontemporer, semakin banyak gerakan-gerakan Islam melibatkan diri dalam isu demokratisasi dan *civil society*. Hubungan antara demokrasi dan Islam saat ini begitu kompleks. Sistem demokrasi Barat dalam perkembangannya menjadi pilihan negara-negara berkembang karena diyakini sebagai sistem yang menjunjung tinggi keadilan dan hak asasi manusia.¹

Gelombang demokrasi Barat telah meluas keberbagai negara, termasuk negara-negara yang berpenduduk muslim. Sejak tahun 1790 hanya terdapat tiga negara yang menganut sistem demokrasi liberal antara lain negara Amerika Serikat, Swiss, dan Perancis. Pada tahun 1848 jumlahnya berkembang menjadi lima negara, tahun 1900 berjumlah tiga belas negara, tahun 1919 berjumlah dua puluh lima negara, tahun 1940 berkembang jumlahnya menjadi tiga belas negara, tahun 1960 berjumlah tiga puluh enam

¹ Abdul Mustaqim, "Mendialogkan Islam dan Demokrasi: Persimpangan Doktrin dan Implementasi", *Profetika*, Vol.4, No.2 Juli 2002, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2002), hlm. 202.

negara, tahun 1975 berjumlah tiga puluh negara dan pada tahun 1990 berjumlah enam puluh satu negara.²

Survei terhadap demokrasi yang dilakukan pada tahun 1939, negara yang sudah demokratis sejumlah 12 negara. Antara lain Kanada, Amerika Serikat, Belgia, Denmark, Irlandia, Prancis, Inggris, Netherland, Norwegia, Swedia, dan Switzerland.³ Menurut penelitian yang dilakukan UNESCO pada tahun 1949 menyatakan untuk pertama kali dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukungnya yang sangat berpengaruh.⁴

Seolah tidak ingin diberi label anti demokrasi, banyak kalangan Muslim yang kemudian menyatakan bahwa Islam sudah sesuai dengan demokrasi Barat. Karena demokrasi Barat sudah menjadi tren global, banyak orang yang kemudian menyuarakan demokrasi sebagai sebuah sistem yang ideal dan tepat bagi suatu negara yang kemudian harus diikuti oleh setiap manusia. Ada yang berpendapat, dengan demokrasi suatu bangsa akan menjadi bangsa besar dan kuat. Ada sebagian kalangan yang menjadikan demokrasi bukan sekedar mekanisme pemilihan kepemimpinan tetapi sebagai jalan hidup.⁵

² Francis Fukuyama, *The End of History and the Last Man*, (New York: Avon Books, 1992), hlm. 49-50.

³ Muslim Mufti dan Didah Durrotun Naafisah, *Teori-Teori Demokrasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm.49.

⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.105.

⁵ Adian Husaini, "Menimbang Kembali Konsep Demokratis", *Akademika*, Vol. 4, No. 1, November 2009, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009), hlm.7.

Gelombang besar demokrasi ini kemudian menarik kalangan Muslim untuk masuk kepusaran gelombang isu demokrasi tersebut. Supaya tidak dikatakan tertinggal dalam sistem demokrasi dan masuk bagian dari pergaulan global, banyak yang kemudian mengikuti konsep demokrasi tersebut tanpa mempertimbangkan dengan matang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Banyak pihak yang mempertanyakan apakah ajaran Islam dan nilai-nilai demokrasi selaras dan *compatible*. Bahkan terdapat pihak-pihak yang tidak setuju bahwa definisi demokrasi seringkali dirumuskan secara sempit dari sudut pandang Barat semata.

Salah satu tokoh besar Abul A'la Al-Maududi dengan tegas menentang konsep demokrasi Barat, yang menjadikan kedaulatan adalah mutlak ditangan rakyat. Penolakanya Abul A'la Al-Maududi terhadap demokrasi Barat tidak hanya berdasarkan alasan teologis dan substansi demokrasi Barat, melainkan praktek demokrasi yang cenderung *mudharat* yang terjadi di negara India saat itu. Setidaknya terdapat dua hal yaitu *pertama*, keadaan rakyat India yang tertindas dan terbelakang, termasuk di dalamnya umat Islam. *Kedua*, Gerakan kemerdekaan di India khususnya hari kedepan hubungan umat Muslim dan Hindu selepas penjajahan Inggris selain itu kenyataan dari adanya kelebihan dan kemajuan Barat yang menjajah India dan bahkan sebagian besar wilayah dunia Islam.⁶

⁶ Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernisme dan Fundamentalisme*, (Magelang: Indonesiatara, 2001), hlm.77-78

Demokrasi Barat kedaulatan mutlak di tangan rakyat. Berbeda dengan pandangan Abul A'la Al-Maududi, bahwa Tuhan sebagai satu-satunya zat yang berkuasa memberi hukum dan memberikan prinsip-prinsip pokok otoritas. Semua hukum dan adat kebiasaan yang berbeda dengan petunjuk Allah SWT harus ditinggalkan. Semua teori atau ajaran yang tidak mengacu pada petunjuk Allah SWT dianggap sebagai menolak kedaulatan Tuhan dan membuat Tuhan selain daripada Allah SWT. Tunduk dan patuh kepada Tuhan berarti membawa seantero hidup manusia ini sesuai dengan kehendak Allah SWT yang diwahyukan.⁷

Abul A'la Al-Maududi berkeyakinan, bahwa Islam terdapat prinsip-prinsip yang sangat fundamental sebagai dasar membangun sistem politik yang kuat berdasarkan al-Qur'an dan Hadis. Thameem Ushama cendikiawan Muslim dari Universitas Islam Internasional Malaysia (IIUM) mengatakan :

*“According to Mawdudi, Islamic state is based on three fundamental principles: Tawhid, Risalah, and Khilafah. Tawhid means that the sovereignty vest in Allah alone, and that His commandments are the basic law. Risalah stands for the supremacy of the syari'ah, the Qur'an and the Sunnah. Khilafah stands for the vicegerency of man. In Western democracy, sovereignty vests in the people; whereas in Islam, sovereignty vests in God”.*⁸

Terdapat tiga dasar keyakinan yang melandasi pikiran-pikiran Abul A'la Al-Maududi tentang kenegaraan menurut Islam dan dijadikan prinsip

⁷ Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm.244.

⁸ Thameem Ushama dan Noor Mohammad Osmani, “Sayyid Mawdudi's Contribution Towards Islamic Revivalism”, *IIUC Studies*, Vol.3, December 2006, (Malaysia: International Islamic University Malaysia, 2006), hlm. 96.

yang fundamental mengapa Abul A'la Al-Maududi menentang konsep kedaulatan rakyat.

“*Pertama*, Islam adalah suatu agama yang paripurna, lengkap dengan petunjuk untuk mengatur semua segi kehidupan manusia termasuk kehidupan politik. Islam terdapat pula sistem politik yang berdasarkan al-Qur'an dan Hadis. *Kedua*, kekuasaan tertinggi yang sering disebut kedaulatan, dalam Islam hanyalah milik Allah SWT. Umat manusia hanyalah pelaksana kedaulatan Allah tersebut sebagai khalifah-khalifah di bumi. Dengan demikian tidak dibenarkan gagasan kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan mutlak. *Ketiga*, sistem politik Islam adalah suatu sistem yang universal dan tidak mengenal batas-batas dan ikatan geografi, bahasa dan kebangsaan.”⁹

Islam adalah agama yang mengajarkan dan mengatur masalah negara. Umat Islam tidak perlu atau bahkan dilarang meniru sistem Barat yang liberal dan sekuler karena akan merusak tatanan kehidupan.¹⁰ Gagasan kedaulatan rakyat sebagai ide dasar demokrasi Barat tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Kedaulatan tertinggi dalam demokrasi Barat mutlak ditangan rakyat, artinya bahwa rakyat adalah sumber kekuasaan tertinggi dalam negara. Bahkan keputusan – keputusan mayoritas tersebut dapat mengesampingkan kehendak Allah SWT.¹¹

Islam adalah agama yang mengandung aspek individual dan aspek sosial. Negara adalah bagian dari aspek sosial dalam kehidupan beragama di dalam Islam. Ketika seseorang menjalankan Islam, maka orang tersebut akan menyangkut persoalan publik. Diantara masalah publik itu adalah negara.

Tidak dibenarkan umat Islam meletakkan agama disatu sisi dan negara disisi

⁹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993), hlm.166.

¹⁰ Abul A'la Al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, trans. And ed. Khurshid Ahmad, (Lahore: Islamic Publications, 1960), hlm.125-126.

¹¹ Yusril Iihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam politik Islam* (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 245.

lain. Negara terkait erat dengan agama dan tidak ada pemisahan. Antara agama dan politik tidak dapat dipisahkan, karena dalam ajaran agama Islam terkandung aturan-aturan hidup yang tidak hanya mengandung ajaran yang terkait dengan permasalahan ibadah saja. Islam terdapat juga bahasan tentang keduniawian termasuk urusan politik dan kenegaraan.¹²

Pada konteks kekinian, tampaknya terjadi kecenderungan global di mana demokrasi tidak lagi sekedar menjadi wacana intelektual (*intellectual discourse*), melainkan juga impian bahkan obsesi politik berbagai negara, khususnya negara-negara berkembang. Indonesia adalah salah satu negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia¹³ dan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah negara India dan Amerika Serikat.¹⁴ Walaupun disebut-sebut sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, namun pada level implementasi demokrasi di Indonesia dinilai masih pada tingkat prosedural, belum sampai pada substansial sehingga belum memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakatnya. Bukti tersebut dapat dilihat dari tersediannya berbagai institusi demokrasi seperti partai, parlemen, eksekutif yang berfungsi sesuai dengan aturan hukum yang ada. Institusi yang ada belum mampu memenuhi keinginan dari rakyat seperti pemenuhan tingkat kesejahteraan, perlindungan terhadap hak minoritas dan terciptanya keadilan.

¹² Shahbaz Ahmad Cheema, "Problematizing the Religious Basis of Maududi's Political Theory", *Studies on Asia*, Series IV, Volume 3, No.2, October 2013 (Lahore: University of the Punjab, 2013), hlm.52.

¹³ Yudi Junadi, *Relasi Agama dan Negara: Redefinisi Diskursus Konstitusionalisme di Indonesia*, (Jakarta: IRM Press, 2011), hlm.88.

¹⁴ Akbar Tanjung, *The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm.2.

Demokrasi Barat telah gagal mewujudkan cita – cita demokrasi itu sendiri, yaitu kedaulatan rakyat disemua aspek kehidupan. Demokrasi Barat hanya memberikan kedaulatan rakyat dibidang politik saja sedangkan dibidang ekonomi berlaku kedaulatan kaum pemodal. Demokrasi Barat bersifat negatif karena ciri individualisme yang terkandung dalam paham liberalisme yang melahirkan demokrasi Barat, semangat individualisme ini memang telah melahirkan demokrasi atau kedaulatan rakyat dalam kehidupan politik, tetapi memunculkan kapitalisme di bidang ekonomi. Dalam penerapannya, terutama dalam bidang ekonomi, individualisme telah menimbulkan kepincangan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Dalam hubungannya dengan negeri-negeri terjajah, demokrasi Barat telah menghasilkan diskriminasi yang bersifat rasialis dan menindas. Individualisme menghalangi terwujudnya demokrasi dalam arti yang sebenarnya, yaitu kedaulatan rakyat di semua aspek kehidupan. Demokrasi Barat harus ditolak sebagai dasar untuk membangun Indonesia.¹⁵

Kedaulatan rakyat (*volkssoeveriniteit*) menurut Mohammad Hatta sebagai demokrasi impor, artinya tidak berdasarkan kebudayaan Indonesia. Dasar kedaulatan rakyat yang dijunjung tidak sama dengan *volkssoeveriniteit* yang berdasar individualisme. Memang ada persamaan nama, tetapi tidak ada persamaan rupa. Mohammad Hatta menjelaskan bahwa

¹⁵ Zulfikri Sulemen, *Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), hlm.13-15.

Timur boleh mengambil mana yang baik dari Barat, tetapi jangan ditiru melainkan disesuaikan, jangan di *adopteern* melainkan di *adapteeren*.¹⁶

Meskipun Indonesia menerapkan sistem demokrasi multipartai yang cenderung liberal selama kurun waktu 15 tahun terakhir sejak tahun 1999 masa pasca otoritarianisme Presiden Soeharto, masih banyak kalangan khususnya luar negeri, yang belum yakin dengan masa depan demokrasi di Indonesia. Masih terdapat *skeptisisme* dalam pikiran mereka, khususnya menyangkut hubungan antara Islam dan demokrasi di negara yang berpenduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia. Dalam konteks itu, tidak mengherankan jika pembicaraan tentang Indonesia, Islam dan demokrasi menjelang dan pascapilpres 2014 masih menjadi agenda percakapan dalam berbagai konferensi dan seminar, khususnya di luar negeri.¹⁷

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia harus bertumpu pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa pada semua aspek kehidupan. Sehingga keadilan dan kesejahteraan akan terwujud dengan baik. Tesis yang disusun oleh penulis ini akan mencoba menguraikan relevansi demokrasi Ketuhanan (theo demokrasi) yang digagas oleh Abul A'la Al-Maududi dalam konteks Indonesia sekarang, dimana Indonesia saat ini sebagai sebuah negara dengan Muslim terbesar di dunia dan penganut demokrasi terbesar ketiga di dunia. Selanjutnya akan dijelaskan juga secara rinci kritik terhadap demokrasi Barat dalam pandangan Abul A'la Al-Maududi.

¹⁶Azyumardi Azra, *Islam dan Demokrasi di Indonesia*, (<http://www.republika.co.id> diakses 28 Oktober 2014).

¹⁷Wawan Tunggul Alam, *Demi Bangsaaku Pertentangan Bung Karno vs Bung Hatta*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm.60.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kritik Abul A'la al-Maududi terhadap konsep demokrasi Barat?
2. Bagaimana relevansi gagasan theo demokrasi Abul A'la al-Maududi dalam konteks Indonesia sekarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian terhadap pemikiran Abul A'la al-Maududi dengan tujuan-tujuan sebagai berikut:

- a. Mengetahui kritik Abul A'la al-Maududi terhadap konsep demokrasi Barat.
- b. Mendiskripsikan relevansi gagasan Abul A'la al-Maududi tentang theo demokrasi dalam konteks Indonesia saat ini.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi dunia intelektual atau perguruan tinggi sebagai wacana dan pengembangan tradisi keilmuan secara umum dan secara khusus sebagai pengembangan konsep dakwah Islam dalam bidang politik.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini sebagai referensi bagi aktivis, cendekiawan atau negarawan Muslim yang kosen dalam bidang Ilmu Politik baik dalam perspektif Islam dan Barat.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau referensi bagi akademisi yang kosen mengkaji sistem politik dan kenegaraan, salah satunya sebagai bahan evaluasi terhadap implementasi sistem demokrasi yang sudah diterapkan di Negara-negara Islam saat ini.
3. Penelitian ini sebagai bahan referensi bagi pengelola lembaga pemerintah dalam menjalankan amanahnya sebagai pewaris nabi dan ulama dalam membangun sistem kenegaraan yang sarat dengan nilai-nilai Ketuhanan.

4. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap hasil-hasil penelitian, baik dalam bentuk tesis, buku, maupun jurnal ilmiah. Wacana dan pembahasan tentang pemikiran demokrasi dan Islam secara umum telah banyak dilakukan secara akademik. Itu dapat dilihat dari beberapa penelitian terdahulu yang bersinggungan dengan konsep demokrasi dan Islam. Adapun penelitian-penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis angkat dalam tesis ini antara lain.

Pertama, Yusril Ihza Mahendra dengan judul *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam (Perbandingan Partai Masyumi*

Indonesia dan Partai Jama'at-i-Islami Pakistan).¹⁸ Buku ini merupakan hasil dari Desertasi untuk memperoleh gelar doktor Ilmu Politik di Universitas Sains Malaysia. Buku ini diterbitkan oleh Penerbit Paramadina pada Tahun 1999. Buku ini membahas Perbandingan Partai Masyumi di Indonesia dan Partai Jama'at-i-Islami di Pakistan, aliran politik modernisme dan fundamentalisme Islam yang dikaji ini terbatas kepada periode tertentu dan khusus tertentu pula. Periode khusus ini dibatasi selama lebih kurang dua dekade, antara tahun 1940-1960. Kasusnya pun dibatasi hanya pada satu partai Islam modernis yaitu Partai Masyumi di Indonesia dan satu partai Islam fundamentalis, Jama'at-i-Islami di Pakistan. Dekade 1940-1960 seperti ditunjukkan dalam studi ini, partai Islam modernis nampak berada posisi yang lebih kuat secara politik, dibandingkan partai Islam fundamentalis. Dalam dua dekade tersebut, partai Islam Modernis memegang kekuasaan pemerintahan atau sekurang-kurangnya bekerja sama dengan kelompok lain. Faktor ini yang di anggap sebagai salah satu faktor yang mendorong dan memperkuat aliran modernisme yang dianutnya. Sebaliknya, partai Islam fundamentalis berada dalam posisi sebagai partai oposisi yang jauh dari kekuasaan. Fakta itu dapat juga dianggap sebagai faktor yang telah mendorong dan terus memperkuat partai fundamentalis untuk menganut aliran tersebut.

¹⁸ Yusril Ihza Mahendra, "Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam", *Buku*, (Jakarta: Paramadina, 1999).

Kedua, Buku oleh Kamaruzzaman dengan judul *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernisme dan Fundamentalisme*.¹⁹ Buku ini diterbitkan oleh Penerbit Yayasan Indonesiatara pada Tahun 2001. Buku ini menjelaskan bahwa demokrasi yang berlaku dinegara – negara sekuler Barat memang telah memberikan banyak pelajaran tentang sistem kenegaraan. Baik secara normatif atau historis, bahwa negara Islam dengan berbagai nama dan bentuknya pernah berdiri. Bahkan di Indonesia sebelum bangsa Barat menjajah, pemerintahan yang berbasiskan Islam telah bermunculan di berbagai daerah. Di Aceh misalnya, kerajaan Islam telah berdiri dan Islam sebagai sendi kehidupan. Tidak dapat dipungkiri bahwa daerah yang berbasis Islam ini dapat bersanding dengan negara-negara Islam di berbagai belahan dunia Islam. Hal serupa juga terjadi di berbagai kerajaan Islam di daerah lain yang menunjukkan tidak terpisahnya antara agama dan negara, ternyata justru mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sebaliknya setelah bangsa Eropa datang menjajah, sejak itulah Agama dan negara terpisah bahkan menghilangkan unsur agama sama sekali. Buku ini berusaha menunjukkan pemikiran 2 tokoh besar tentang kenegaraan dan pemerintahan (Abul A'la al-Maududi dan Mohammad Natsir) yang cukup berpengaruh yang digolongkan kepada modernis dan fundamentalis. Sekaligus menunjukkan adanya hubungan erat antara ide dan upaya-upaya praktis yang dilakukan kedua tokoh tersebut dengan ajaran normatif al-Qur'an, pemikiran ulama abad klasik atau

¹⁹ Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernisme dan Fundamentalisme, Buku*, (Magelang: Indonesiatara, 2001).

pertengahan, dan juga tradisi empiris sejak Nabi Muhammad SAW lahir hingga masa modern.

Ketiga, Tesis oleh Munifah Syanwani program studi Kajian Timur Tengah dan Islam, Program Pascasarjana Universitas Indonesia Tahun 2004 dengan judul *Perbandingan pemikiran politik Islam Abul A'la Al-Maududi dengan pemikiran dan gerakan Partai Bulan Bintang di Indonesia (politik dan hubungan internasional di Timur Tengah)*.²⁰ Penulis memfokuskan bahasan khusus pada pandangan dan pemikiran politik Abul A'la al-Maududi di Pakistan sangat banyak berpengaruh pada dunia Islam, maka untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengaruh dari pandangan pemikiran tersebut, penulis mencoba mengadakan kajian khusus pada organisasi dan gerakan Islam yang ada di negara lain, dalam hal ini penulis mengambil obyek gerakan Islam pada Partai Bulan Bintang di Indonesia yang kemudian akan mengambil perbandingan dari dua pemikiran tersebut (komparasi). Dari kedua pemikiran politik tersebut, yaitu pemikiran Abul A'la al-Maududi yang diimplementasikan pada gerakan organisasinya yaitu Jama-at-Islami di Pakistan dengan pemikiran dan gerakan Partai Bulan Bintang di Indonesia. Kedua organisasi politik ini mengumandangkan pemberlakuan *Islam as way of life* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, juga dengan adanya idealisme besar dari Partai Bulan Bintang yaitu *Izzul Islam wal Muslimin*.

²⁰ Munifah Syanwani, "Perbandingan Pemikiran Politik Islam Abul A'la Al-Maududi dengan Pemikiran dan Gerakan Partai Bulan Bintang di Indonesia (Politik dan Hubungan Internasional di Timur Tengah)", *Tesis*, (Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004).

Keempat, Tesis oleh Faidi Ach program studi Agama dan Lintas Budaya Minat Kajian Timur Tengah, Program Pascasarjana UGM Tahun 2010 dengan judul *Kekhalifahan Islam dalam pandangan Ali Abdur Raziq dan Abul A'la al-Maududi: Tinjauan historis upaya mencari sistem pemerintahan ideal*.²¹ Penelitian ini membahas tentang sistem kekhalfahan Islam dalam pandangan Ali Abdur Raziq dan Abul A'la al-Maududi. Dari pendapat kedua tokoh ini penulis kemudian menguraikan tentang sistem pemerintahan yang ideal menurut pandangan masing-masing. Ali Abdur Raziq dan Abul A'la al-Maududi sama-sama medasarkan pendapatnya pada petunjuk al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama ajaran Islam. Sehingga menurut penulis, meneliti sistem kekhalfahan merupakan sesuatu hal yang urgen, bukan merupakan hal yang *out of date* dan tidak perlu, justru sebaliknya merupakan hal yang *up to date* dan menarik di tengah umat Islam yang sedang gamang mencari identitas *religio* politiknya. Penelitian ini bertujuan ikut serta membantu menemukan rumusan sistem pemerintahan ideal bagi umat Islam, dengan mempertimbangkan dua corak pemikiran yang berlawanan.

Beranjak dari penjelasan tentang penelitian terdahulu, maka studi tentang “Kritik Abul A'la al-Maududi terhadap demokrasi Barat” menjadi hal yang tepat. Penulisan tesis ini diharapkan dapat menjadi penguat pemikiran dari penelitian sebelumnya. Khususnya bagaimana konsep theo-demokrasi

²¹ Faidi Ach, “Kekhalifahan Islam dalam Pandangan Ali Abdur Raziq dan Abul A'la al-Maududi: Tinjauan Historis Upaya Mencari Sistem Pemerintahan Ideal”, *Tesis*, (Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Gajah Mada, 2010).

dapat menjadi alternatif dan jalan tengah bagi Islam, negara dan demokrasi dalam konteks kekinian.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakannya untuk memecahkan masalah penelitian atau batasan-batasan tentang teori yang digunakan menjadi landasan penelitian. Penulis menggunakan kerangka teori di dalam pembahasan ini guna mencapai pada pendekatan tertentu dan tidak keluar dari tujuannya.

1. Esensi Demokrasi Barat

Istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atau *government by the people*. Demokrasi selalu diasosiasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Salah satu gagasan penting yang menjadi dasar kaum liberal dan sekuler adalah gagasan mengenai demokrasi. Gagasan tersebut banyak mengambil nilai-nilai dari peradaban Barat yang liberal dan sekuler. Peradaban Barat dalam keyakinannya bisa mencapai kesuksesan dan kemajuan material adalah karena menggunakan kebebasan dan menjadikan demokrasi sebagai sistem kenegaraan.²²

Semua model demokrasi modern berpangkal pada gagasan kebebasan sebagai sendi utama. Ada tiga unsur penting di dalam sistem demokrasi Barat. *Pertama*, yang dimaksud dengan istilah rakyat atau bangsa dalam sistem demokrasi modern, seperti yang dikenal di dunia

²² Lathifah Ibrahim Khadar, *Barat Memfitnah Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm.99.

Barat adalah rakyat yang terbatas pada lingkup teritorial geografis yang hidup pada suatu daerah tertentu dan disatukan dengan ikatan-ikatan darah, ras, bahasa dan tradisi yang sama. Artinya adalah demokrasi secara pasti dipengaruhi pemikiran nasionalisme dan *rasialisme* yang dipenuhi oleh kecenderungan fanatisme kelompok. *Kedua*, tujuan-tujuan demokrasi modern adalah untuk kepentingan materi atau dunia. Demokrasi Barat berpretensi untuk mewujudkan kebahagiaan umat atau suatu bangsa dengan menyediakan kebutuhan-kebutuhan di dunia. *Ketiga*, Kekuasaan rakyat dalam demokrasi Barat adalah mutlak. Rakyat adalah sumber kebenaran dan secara penuh memegang kedaulatan.²³

Selain unsur-unsur tersebut di atas, demokrasi Barat juga menganut prinsip-prinsip yang sangat fundamental. *Pertama*, kebebasan individual (*individual freedom*). *Kedua*, kontrak sosial. *Ketiga*, demokrasi Barat menganut prinsip masyarakat pasar bebas (*free market society*). *Keempat* adalah demokrasi liberal mengakui eksistensi pluralitas sosio-kultural dan politik masyarakat.²⁴

Substansi hak-hak asasi dalam masyarakat demokratis adalah hak politik (demokrasi politik, mengenai hubungan negara dengan masyarakat), hak sipil (demokrasi sosial dan demokrasi ekonomi, mengenai hubungan elite dengan masa), dan hak aktualisasi diri

²³ Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 309-311.

²⁴ Ahmad Suhelmi, *Pemikir Politik Barat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 295.

(demokrasi budaya dan demokrasi agama, mengenai hubungan negara dengan warga negara, serta hubungan antar warga negara).²⁵

Penting untuk dipahami dalam membedakan demokrasi sebagai suatu metode untuk membentuk suatu sistem politik atau suatu proses untuk membuat keputusan-keputusan kolektif. Demokrasi Barat adalah suatu kombinasi dari sistem politik demokrasi dan ideologi politik yang liberal yang menekankan hak-hak dan nilai-nilai tertentu seperti kepemilikan pribadi, kebebasan negatif, individualisme dan toleransi. Barat dalam konteks ini adalah bukan arah suatu letak geografis melainkan adalah suatu peradaban besar, kuat dan sangat berpengaruh dalam kehidupan di dunia saat ini. Dalam sistem demokrasi Barat seorang individu akan mendapat perlindungan dari tindakan sewenang-wenang pejabat atau penguasa pemerintah.²⁶

2. Demokrasi dan Teori Kedaulatan

Kata daulat dan kedaulatan berasal dari bahasa Arab yang berasal dari akar kata yakni *daulah*, '*daulat* atau '*daulat* yang dalam makna klasiknya berarti rezim politik atau kekuasaan. Kata daulat mencakup dua pengertian tentang dinamika kekuasaan dibidang politik dan ekonomi sekaligus. Istilah ini masuk ke dalam kosakata Indonesia melalui akulturasi dengan sistem politik di kerajaan-kerajaan nusantara, sehingga menjelang kemerdekaan Republik Indonesia para

²⁵ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 91.

²⁶ Ahmed Vaezi, *Agama Politik: Nalar Politik Islam*, (Jakarta: Citra, 2006), hlm.201.

pendiri negara kita biasa menggunakan istilah daulat rakyat dan daulat tuanku.²⁷

Kedaulatan mengandung pengertian sebagai kekuasaan mutlak dan tertinggi yang berada dalam suatu negara. Jean Bodin berpendapat bahwa kekuasaan mutlak dan tertinggi merupakan hal yang penting bagi sebuah negara dalam rangka mengatur seluruh warga negara atau orang lain di dalam wilayahnya. Berkaitan dengan kekuasaan yang dimiliki penguasa yang karena diperoleh dalam kurun waktu tertentu, maka kekuasaan tertinggi itu tidak dapat disebut sebagai kedaulatan. Penguasa hanyalah sebuah alat untuk melaksanakan kehendak dari pihak yang memberikan kekuasaan kepadanya.²⁸ Teori Kedaulatan digagas oleh Jean Bodin menjadi batu pijakan bagi terbentuknya gagasan demokrasi Modern. Pemikirannya dianggap sebagai cikal bakal gagasan negara-kebangsaan (*nation-state*) dengan kekuasaan dan kedaulatan yang berpusat pada sang raja.²⁹

Kedaulatan adalah persoalan terkait dimana letak kekuasaan tertinggi atau siapa yang memimpin atau berdaulat, dalam sistem demokrasi kedaulatan adalah ditangan rakyat. Sedangkan di dalam konsep theo demokrasi kedaulatan berada ditangan Tuhan yang direpresentasikan di dalam *syari'ah*. Inti perdebatan di dalam demokrasi dan Islam adalah dimana letak kekuasaan (siapa pemimpin) atau yang

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta : BIP, 2007), hlm. 143.

²⁸ Jean Bodin, *Six Books Of Commonwealth Blackwell's Political Texts*, (Michingan University : B. Blackwell, 1995), hlm.70.

²⁹ Fuad Hasan, *Pengantar Filsafat Barat*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1996), hlm.73.

berdaulat. Dengan menggunakan teori kedaulatan dapat diketahui dimana letak perbedaan dan persamaan antara demokrasi dan theokrasi.

Dalam perkembangannya ilmu hukum dikenal adanya lima teori kedaulatan. Teori kedaulatan Tuhan, Teori kedaulatan Negara, Teori kedaulatan Raja, Teori kedaulatan Hukum, dan Teori kedaulatan Rakyat.³⁰

a) Teori Kedaulatan Tuhan

Teori kedaulatan Tuhan adalah kekuasaan tertinggi dalam negara berasal dari Tuhan. Raja atau penguasa negara mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sehingga kehendak raja atau penguasa merupakan kehendak Tuhan. Teori ini menganggap bahwa Tuhan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara.³¹ Teori ini menjelma dalam hukum yang harus dipatuhi oleh kepala negara atau menjelma dalam kekuasaan raja sebagai kepala negara yang mengklaim memiliki wewenang mutlak untuk menetapkan hukum atas nama Tuhan.³²

b) Teori Kedaulatan Raja

Teori kedaulatan Raja adalah merupakan perwujudan dari teori kedaulatan Tuhan. Kekuasaan tertinggi di tangan raja atau penguasa. Raja dianggap keturunan dewa atau wakil Tuhan di bumi yang mendapat kekuasaan langsung dari Tuhan sehingga kekuasaannya

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok...*, hlm. 143.

³¹ Aidul Fitriciada Azhari, *Sistem Pengambilan Keputusan Demokratis Menurut Konstitusi*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000), hlm. 26

³² Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 9-10.

mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Teori ini beranggapan bahwa rajalah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Raja bahkan dianggap sebagai pemimpin suci yang dipilih seperti pandangan Romawi Kuno sebagai pemegang kedaulatan untuk menciptakan hukum dan sekaligus melaksanakannya.³³

c) Teori Kedaulatan Negara

Teori kedaulatan Negara adalah kekuasaan pemerintahan berdasar dari sumber kedaulatan Negara. Karena sumber kedaulatan dari Negara, maka segera dianggap memiliki kekuasaan yang tidak terbatas dan kekuasaan itu diserahkan kepada Raja atas nama Negara. Negara berhak membuat aturan hukum, negara tidak wajib tunduk terhadap hukum. Teori ini reaksi terhadap kesewenang-wenang Raja yang muncul bersamaan dengan timbulnya konsep negara-bangsa dalam pengalaman sejarah Eropa. Masing-masing kerajaan di Eropa melepaskan diri dari ikatan negara dunia yang diperintah oleh raja yang sekaligus memegang kekuasaan sebagai kepala Gereja.³⁴

d) Teori kedaulatan hukum

Teori kedaulatan Hukum adalah teori kedaulatan yang menekankan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara terletak pada hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Pelaksanaan pemerintah dibatasi oleh norma sehingga tidak bersifat absolut.

³³ Aidul Fitriciada Azhari, *Sistem Pengambilan Keputusan...*, hlm.27.

³⁴ Ibid, hlm.28.

Semua tindakan penyelenggara negara dan rakyat harus berdasarkan hukum yang berlaku. Teori ini menganggap bahwa negara itu sesungguhnya tidaklah memegang kedaulatan. Sumber kekuasaan tertinggi adalah hukum dan setiap kepala negara harus tunduk pada hukum.³⁵

e) Teori kedaulatan Rakyat

Teori kedaulatan Rakyat yang menyakini bahwa sesungguhnya berdaulat dalam setiap negara adalah rakyat. Kehendak rakyat merupakan satu-satunya sumber kekuasaan bagi setiap pemerintah. Kedaulatan rakyat adalah salah satu unsur penting dalam demokrasi Barat. Kedaulatan rakyat sendiri merupakan suatu konsep ketatanegaraan yang dianut banyak negara. Jenis teori kedaulatan yang dianut suatu negara biasanya dapat diamati dari dasar negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem hukumnya.³⁶

3. Demokrasi dan Politik Islam

Menurut teori Teori Politik Islam, kedaulatan adalah berada di tangan Allah SWT. Hanya Allah SWT yang memberi hukum tidak ada seorangpun sekalipun Rasul, yang berhak memerintah orang lain sekehendak hatinya sendiri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Teori politik Islam menyatakan bahwa iman terhadap keesaan

³⁵ Ibid, hlm.29.

³⁶ Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat: Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Pebandingannya dengan Negara Lain*, (Bandung: Nusamedia, 2007), hlm. 9.

dan kekuasaan Allah SWT merupakan landasan sistem sosial dan moral yang ditanamkan oleh para Rasul. Dari sini filsafat politik Islam mengambil titik pijak. Prinsip dasar Islam adalah bahwa manusia, baik secara individual maupun kelompok harus menyerahkan semua hak atas kekuasaan, legislasi serta penguasaan atas sesamanya. Tidak seorangpun yang diperkenankan memberi perintah atau aturan-aturan sekehendaknya sendiri dan tidak seorangpun yang diperkenankan untuk mengakui kewajiban untuk melaksanakan perintah atau aturan seperti ini. Tidak seorang pun yang diberi hak istimewa untuk membuat undang-undang yang telah dibentuk dengan cara seperti itu. Hak ini adalah hanya milik Allah SWT.³⁷

Prinsip dalam teori politik Islam antara lain adalah *pertama*, tidak ada orang, kelompok bahkan seluruh penduduk suatu negara dapat melakukan klaim atas *souverenitas* (kedaulatan). Hanya Allah SWT yang memegang kedaulatan dalam arti sebenarnya. Seluruh manusia hanyalah pelaksana Kedaulatan tuhan.³⁸ *Kedua*, Tuhan adalah pencipta hukum sebenarnya (*the real of giver*), sehingga hanya Allah SWT yang berhak membuat legislasi secara mutlak. Manusia diperkenankan membuat legislasi itu sepanjang tidak bertentangan dengan legislasi dasar yang berasal dari wahyu. Secara demikian kita tidak dapat melakukan modifikasi atas hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan, walaupun rencana modifikasi itu disetujui secara aklamasi oleh seluruh anggota

³⁷ Abul A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi...*, hlm.157.

³⁸ Ibid

perwakilan rakyat misalnya. *Ketiga*, suatu perintah yang menjalankan peraturan-peraturan dasar dari Tuhan sebagaimana diterangkan oleh nabinya wajib memperoleh ketaatan rakyat, karena pemerintahan seperti itu pada prinsipnya bertindak sebagai badan politik yang memberlakukan peraturan-peraturan Tuhan.³⁹

4. Tujuan Negara Menurut Islam

Terdapat dua teori modern tentang negara yang saling bertentangan yaitu teori Hegel dan teori Karl Marx. Teori Hegel mengatakan bahwa negara adalah perwujudan dari ide suci (*devide idea*) di muka bumi, di mana setiap warga negara dapat mengidentifikasi martabatnya, statusnya, dan arah kehidupannya. Teori Hegel ini menerangkan bahwa Negara merupakan inkarnasi ide suci dan karenanya negara berada di atas segala-galanya. Makin kuat suatu negara makin baik para warganya. Dengan demikian warga negara harus menyerahkan seluruh dedikasinya kepada negara. Dapat disimpulkan konsep Hegel adalah negara menjadi aparat yang didewakan yang berhak menuntut apapun dari para warganya. Karena itu negara bersifat absolut yang dimensi kekuasaannya melampaui hak-hak transendental individu.⁴⁰

Konsep teori Karl Marx adalah negara pada hakikatnya adalah aparat atau mesin penindasan, tirani atau eksploitasi kaum pekerja oleh pemilik alat-alat produksi (kaum kapitalis) dan pemegang distribusi

³⁹ Abul A'la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, terj. Muhammad al-Baqir, (Bandung: Mizan, 1988). hlm.22.

⁴⁰ Ahmad Suhelmi, *Pemikir Politik...*, hlm. 258.

kekayaan yang menelakakan para pekerja. Tidak aneh jika kita temukan dalam khazanah Marxisme konsep mengenai layunya negara setelah terjadi revolusi sosialis. Artinya setelah terjadinya revolusi sosialis akan terbentuk kediktatoran proletariat dan kemudian melalui kekuasaan kaum proletar itu perbedaan kelas dapat dimusnakan sampai terwujud masyarakat tanpa kelas. Dalam masyarakat tanpa kelas inilah negara sebagai aparat penindas kelas kapitalis akan layu dengan sendirinya dan akan lenyap untuk selama-lamanya (*the withering away of the state*).⁴¹

Bagi Karl Marx ekspresi kehidupan beragama pada dasarnya merupakan ekspresi kehidupan sosial. Agama adalah keluhan kesah warga masyarakat yang tertindas. Agama adalah candu masyarakat yang hanya akan memberikan penenang sementara, tetapi tidak mampu membongkar dan menghilangkan kondisi-kondisi yang menimbulkan penderitaan. Oleh karena itu, sisi positif agama adalah kemampuan memberikan ketenangan dan daya tahan sementara dalam menghadapi kenyataan sosial yang getir dengan harapan nantinya akan mendapatkan kompensasi di hari kemudian (surga) di mana kesengsaraan akan lenyap selamanya.⁴²

Abul A'la Al-Maududi menjelaskan beberapa tujuan diselenggarakan negara. *Pertama*, untuk mencegah terjadinya eksploitasi antar manusia, antar kelompok atau antar kelas dalam masyarakat.

⁴¹ Ibid, hlm. 275

⁴² Komaruddin Hidayat, *Tiga Model Hubungan Agama dan Demokrasi*, (Jakarta: Paramadina, 1994), hlm.190

Kedua, untuk memelihara kebebasan (ekonomi, politik, pendidikan dan agama) para warga negara dan melindungi seluruh warga negara dan intervensi asing. *Ketiga*, untuk menegakkan sistem keadilan sosial yang seimbang sebagaimana dikehendaki dalam al-Qur'an. *Keempat*, untuk memberantas setiap kejahatan dan mendorong setiap kebajikan yang dengan tegas telah digariskan di dalam Al-Qur'an. *Kelima*, menjadikan negara tersebut sebagai tempat tinggal yang teduh dan mengayomi bagi setiap warga negara dengan jalan pemberlakuan hukum tanpa diskriminasi.⁴³

Hegel berpendapat, kuat dan mekarnya negara berarti tercapainya cita-cita manusia (*the flowering of the state is the fulfilment of the destiny of man*), maka Karl Marx justru menganggap lenyapnya negara sebagai *summum bonum*, sebagai kebijakan puncak. Pembentukan negara dalam Islam adalah bagian misi Islam yang agung dan satu kewajiban agama untuk membangun negara dengan adil, makmur dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai agama. Negara yang sudah dibangun perlu dipelihara eksistensinya tetapi tidak boleh negara itu kemudian di Tuhankan atau di dewa-dewakan. Islam menolak utopia Karl Marx yang ingin menenyapkan negara, yang pada gilirannya akan menimbulkan anarki.

⁴³ Abul A'la Al-Maududi. *Khilafah dan Kerajaan ...*, hlm. 33.

F. Metode Penelitian

Sebuah penelitian harus dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Penelitian itu diperlukan metode-metode yang dapat digunakan selama penelitian berlangsung, sehingga dapat diperoleh data yang valid. Metode penelitian adalah langkah-langkah yang berkaitan dengan apa yang akan dibahas. Uraian tentang metode penelitian perlu menegaskan jenis penelitiannya (kualitatif atau kuantitatif), dan menyampaikan secara rinci prosedur dan proses penelitian untuk menjamin keterulangan hasil penelitian.⁴⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *bibliografis*, yaitu penelitian dengan metode sejarah untuk mencari, menganalisa dan membuat *intepretasi* serta generalisasi dari fakta-fakta yang merupakan pendapat para ahli dalam suatu masalah atau suatu organisasi. Penelitian ini mencakup hasil pemikiran dan ide yang telah ditulis oleh pemikir, ahli dan pakar. Proses (kerja) penelitian ini termasuk menghimpun karya-karya tertentu dari seorang penulis atau pakar dan menerbitkan kembali dokumen-dokumen unik yang dianggap hilang dan tersembunyi seraya memberikan interpretasi serta generalisasi yang tepat terhadap karya-karya tersebut.⁴⁵ Penelitian ini sepenuhnya bersifat studi kepustakaan (*library research*)

⁴⁴ M. Thoyibi, *Sistematika dan Teknik Penulisan Artikel Publikasi Hasil Penelitian*, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional *Interdisciplinary Sharing*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 13 September 2013.

⁴⁵ M. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Utama, 1985), hal.62.

dengan menggunakan data-data yang berupa naskah dan tulisan dari buku yang bersumber dari perpustakaan.⁴⁶

Membaca dan menelaah secara mendalam baik data primer sebagai literatur utama, yaitu kitab-kitab karya Abul Ala Al-Maududi yang meliputi berbagai karya terutama yang berkaitan dengan demokrasi. Sumber sekunder yang berupa buku, jurnal, dan artikel para penulis lain yang mengkaji sosok dan pemikiran Abul A'la Al-Maududi serta literatur-literatur karya para ulama yang membahas tentang demokrasi guna mendapatkan hasil penelitian yang lebih komprehensif. Penelusuran pustaka dimaksudkan untuk mempertajam metodologi, memperkuat kajian teoritis, dan memperoleh informasi mengenai penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti lain.⁴⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah *historis-filosofis*.⁴⁸ Pendekatan historis berarti penelitian yang digunakan adalah penyelidikan kritis terhadap keadaan-keadaan, perkembangan serta pengalaman dimasa lampau dan menimbang secara cukup teliti dan hati-hati terhadap bukti *validitas* dari sumber sejarah serta intepretasi dari sumber keterangan

⁴⁶ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm.28 lihat juga Nasution, *Metodologi Research: Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.143.

⁴⁷ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm.105.

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm.25.

tersebut.⁴⁹ Peneliti harus menemukan, menilai, dan menginterpretasikan fakta-fakta yang diperoleh secara sistematis dan obyektif untuk memahami masa lampau.⁵⁰ Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan kenyataan-kenyataan sejarah yang berkaitan dengan pemikiran Abul A'la Al-Maududi, sehingga dapat dipelajari faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pemikirannya.

Pendekatan filosofis digunakan untuk meneliti pemikiran tokoh dan mengungkapkan dibalik hakekat segala sesuatu yang nampak.⁵¹ Sebagai contoh pendekatan ini yang kemudian digunakan untuk mengetahui kritik demokrasi Barat dan konsep theo-demokrasi yang dipaparkan oleh Abul A'la Al-Maududi dalam karya-karyanya, bagaimana Abul A'la Al-Maududi yang banyak menggeluti bidang jurnalistik kemudian terjun dalam perpolitikan dan menjadi salah satu motor penggerak partai Jamaat-I-Islami.

3. Sumber Data

Tahap pengumpulan data dilakukan dengan mencari informasi melalui pencatatan dokumen dalam kartu data.⁵² Metode pengumpulan menggunakan metode dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm.34.

⁵⁰ Nyoman Dantes, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2012), hlm.49.

⁵¹ Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, *Buku Pedoman Penulisan Tesis*, (Surakarta: PPs UMS, 2014).hlm.15.

⁵² Yakub Nasucha, dkk. *Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Yogyakarta: Media Perkasa, 2009), hlm.70.

monumental dari seorang atau tokoh.⁵³ Dokumen-dokumen tersebut misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life history*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan dan lainya.⁵⁴ Sumber data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data yang bersifat primer dan sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama atau data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁵⁵ Untuk sumber data primer penulis menggunakan buku karangan Abul A'la al-Maududi dengan judul buku *The Islamic Law and Constitution* diterbitkan Lahore (1962).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulanya oleh peneliti atau berasal dari tangan ke dua, ke tiga, dan seterusnya artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri.⁵⁶ Sedangkan untuk sumber data sekunder, penulis mengambil dari buku yang terkait antara lain:

Yusril Ihza Mahendra dengan judul buku *Modernisme dan Fundamentalisme dalam politik Islam*, diterbitkan oleh Paramadina

⁵³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm.82.

⁵⁴ Nasution, *Metoda Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1988), hlm.85.

⁵⁵ Surakhmad dan Winarno, *Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, Teknik* (Bandung: Tarsito, 1982), hal.134, lihat juga Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 2002), hlm.55.

⁵⁶ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: FE UII, 2002), hlm 55 Lihat Juga Nasution, *Metodologi Research: Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.143.

Jakarta (1999). Buku karangan karya Munawir Sjadzali yang diterbitkan oleh Universitas Indonesia Press, Jakarta (2003). Judul buku, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Buku adalah karya Kamaruzzaman dengan judul, *Relasi Islam dan Negara, Perspektif Modernis dan Fundamentalis*. Diterbitkan oleh Yayasan Indonesia Siatera, Magelang (2001).

Buku-buku lainya *Pemikiran Politik dalam Al Qur'an* karya Dr. At-Tijjaani Abdul-Qadir Haamid (1995), *Teori Politik Islam* Karangan DR. M. Dhiauddin Rais (2001), *Pemikiran Politik Barat* karangan Ahmad Suhelmi (2001), *Dasar-dasar Ilmu Politik* karangan Miriam Budiardjo (2010), *Menemukan demokrasi* karangan Aidul Fitriaciada Azhari (2005), *Teori-teori demokrasi* karya Muslim Mufti dan Didah Durrotun Naafisah (2013), *Menggali Pancasila dalam perspektif Islam* karya Abdul Karim (2004), *Agama Politik* karya Ahmed Vaezi (2006), *Pengantar Filsafat Barat* karya Fuad Fanani (1996), *Partai Masjumi* karya Remy Madinier (2013), *Teori-teori Politik* karya Muslim Mufti (2013), *Alam pikiran Islam modern di India dan Pakistan* pengarang Mukti Ali (1996), *The End of History and the Last Man* karangan Francis Fukuyama (1992), *Islam dan Kedaulatan Rakyat* karya Jimly Ashiddiqie (1995), dan buku-buku penunjang lainya yang terkait materi tesis yang dibahas.

4. Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskanya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵⁷ Untuk menganalisis data yang terkumpul, peneliti menggunakan analisis data yaitu dengan analisis *deskriptif-kualitatif* artinya yaitu data yang muncul berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati yaitu melalui observasi dan dokumentasi yang diproses melalui pencatatan dan lain-lain kemudian disusun dalam teks yang diperluas.⁵⁸

Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesa tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variable, gejala atau keadaan.⁵⁹ Data yang di peroleh akan dianalisis secara berurutan dan interaksionis yang terdiri dari empat tahapan antara lain 1) Reduksi Data 2) Penyajian Data 3) Pemahaman, Intepretasi dan penafsiran 4) Penarikan Kesimpulan atau verifikasi.⁶⁰

Data yang diperoleh dilapangan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Laporan ini akan terus menerus

⁵⁷ Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm.248.

⁵⁸ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm.26 lihat juga Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm.126.

⁵⁹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen...*, hlm.51.

⁶⁰ H. Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*, (Yogyakarta: Paradigma, 2012), hlm.132.

bertambah dan akan menambah kesulitan bilamana tidak dianalisis sejak awalnya. Laporan-laporan tersebut perlu direduksi yaitu menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan pengorganisasian sehingga terpilah-pilah. Selanjutnya data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk narasi dan terakhir penarikan kesimpulan dari data yang telah disajikan pada tahap ke dua dengan mengambil kesimpulan.

Metode berfikir yang digunakan adalah metode berfikir induktif dan deduktif. Metode induktif adalah suatu penarikan kesimpulan yang dimulai dari pernyataan khusus menuju pada pernyataan yang bersifat umum.⁶¹ Cara berfikir induktif untuk memperoleh konklusi yang bersifat umum bertolak dari fakta-fakta bersifat khusus. Adapun metode deduktif adalah cara penarikan kesimpulan yang dimulai dari pernyataan umum menuju pada pernyataan yang sifatnya khusus.⁶² Cara berfikir deduktif dari pernyataan (konklusi) yang berlaku secara umum kemudian ditarik konklusi secara khusus.

G. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika penulisan penelitian ini disusun dengan sistematis, sehingga dapat mempermudah proses pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang akan diteliti. Sistematika penelitian ini terbagi dalam beberapa bab dan sub bab, yang merupakan uraian singkat tentang isi bab secara garis

⁶¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) hlm.159 lihat juga Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm.21.

⁶² Sutrinno Hadi, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993) hlm.97.

besar yang mencakup semua materi penelitian. Penelitian ini disusun dengan kerangka sistematika berikut:

Pada bab I adalah pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka kerangka teori, metode penelitian berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber penelitian dan metode analisis data, dan terakhir adalah sistematika penulisan. Secara keseluruhan uraian pada bab pertama adalah penjelasan awal tentang cara pandang dan pendekatan yang dipakai merupakan pertanggungjawaban penulis tentang proses penelitian ini.

Pada bab II adalah membahas tentang kerangka teori dari penulisan tesis ini. Pada bab ini dijelaskan secara rinci tentang masalah-masalah yang akan dibahas dan pendekatan teori yang digunakan dalam penulisan tesis tersebut. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih spesifik, maka dibahas pula konsep demokrasi secara umum dan khusus mulai dari definisi, sejarah, paradoks demokrasi Barat dan dilema implementasi demokrasi Indonesia. Selanjutnya akan membahas tentang konsep kedaulatan dalam perspektif Islam, pengertian Khilafah Islam, teokrasi dalam Islam dan demokrasi dalam perspektif Islam.

Pada bab III adalah akan dibahas biografi Abul A'la Al-Maududi dan pemikiran politik. Dijelaskan pada bab ini hal-hal yang berkaitan riwayat hidup, pendirian partai Jama'at-I-Islami, karya-karya intelektual dan pemikiran politik. Riwayat hidup akan menjelaskan secara spesifik latar belakang kehidupan keluarga, pendidikan formal dan informal Abul A'la Al-

Maududi. Akan dijelaskan juga karir politik yang pada akhirnya mendirikan partai politik Islam Jama'at-I-Islami. Terakhir akan dijelaskan karya-karya besarnya dan pemikiran politiknya yang sangat berpengaruh di dunia Islam.

Pada bab IV adalah akan dibahas analisis terhadap Pandangan Abul A'la Al-Maududi tentang demokrasi. Diawali dengan paparan tentang kritik demokrasi Barat dalam pandangan Abul A'la Al-Maududi. Dijelaskan juga mengenai konsep theo-demokrasi dalam pandangan Abul A'la Al-Maududi dan pada bagian akhir akan diuraikan relevansi dalam konteks Indonesia saat ini.

Pada bab V dalam penelitian ini berisikan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat sejumlah jawaban terhadap rumusan masalah dari semua temuan hasil penelitian dan mengklarifikasi kebenaran serta kritik yang dirasa perlu.